

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	x
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Penegasan Istilah	7
F. Metode Penelitian	8
G. Sistematika Pembahasan	13

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Pustaka	15
1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU)	15

a. Pengertian PERPPU	
b. Dasar Hukum PERPPU	
c. Ketentuan Penyusunan PERPPU	
2. Fiqih Siyasah	38
a. Pengertian Fiqih Siyasah	
b. Ulama-Ulama Fiqih Siyasah	
c. Ketentuan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dalam Fiqih Siyasah	
3. Penelitian Terdahulu	53

BAB III : PAPARAN DATA

A. PERPPU Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya	65
B. Proses Pembentukan PERPPU Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya yang Tidak Melalui Prosedur Dimintakan Persetujuan Kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam Sidang Berikutnya	71
C. Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap PERPPU Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya	75

BAB IV : PEMBAHASAN

A. Alasan PERPPU Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya Tidak Dimintakan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Sidang Berikutnya	80
B. Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pembentukan PERPPU Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya	86

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	93
B. Saran	93

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN